



Pengaruh Pendapatan UMKM terhadap Kemampuan Membayar Pajak di Kota Bandung

Fadhia Audia Azani¹, Ishaura Rahmatunnisa², Isnanita Nazila Rahmatika³,
Khalisah Khazni Fadilah⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Pasundan^{1,2,3,4}

*Email fadhia.244020026@mail.unpas.ac.id, ishaura.244020041@mail.unpas.ac.id,
isnanita.244020047@mail.unpas.ac.id, khalisah.244020056@mail.unpas.ac.id

Diterima: 14-06-2026 | Disetujui: 18-06-2026 | Diterbitkan: 20-06-2026

ABSTRACT

This scholarly inquiry aims to investigate how MSME income affects the ability to fulfill tax obligations in the Bandung. MSMEs are considered a key sector within the Indonesian economic system, with more than 65 million business units in 2025 and contributing over 99% of total enterprises at the national level. However, this sector's contribution to taxation remains relatively minimal. This investigation adopts a quantitative approach, based on data collected through survey questionnaires administered to MSME participants in Bandung. The analytical method employs simple linear regression using SPSS. The research variables include MSME income (independent variable) and the ability to pay taxes (dependent variable). The expected findings of this research are that MSME income has a positive and significant effect on their capacity to fulfill tax obligations.

Keywords: MSME Income, Ability to Pay Taxes, MSMEs.

ABSTRAK

Kajian ini dimaksudkan guna menganalisis bagaimana pendapatan UMKM memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajak di Kota Bandung. UMKM adalah salah satu sektor yang dominan dalam perekonomian Indonesia yang memiliki lebih dari 65 juta satuan usaha di tahun 2025 dan menyumbang lebih dari 99% satuan usaha di tingkat nasional. Akan tetapi, kontribusi sektor ini dalam perpajakan masih sangat minim. Kajian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui instrumen kuesioner yang didistribusikan kepada pelaku UMKM di Kota Bandung. Metode analisis memanfaatkan regresi linear sederhana dengan aplikasi SPSS. Variabel studi mencakup pendapatan UMKM (variabel independen) dan kemampuan pembayaran pajak (variabel dependen). Temuan yang diharapkan dari kajian ini adalah pendapatan UMKM terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kapabilitasnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Pendapatan UMKM, Kemampuan Membayar Pajak, UMKM.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azani, F. A., Rahmatunnisa, I. ., Rahmatika, I. N., & Fadilah, K. K. . (2026). Pengaruh Pendapatan UMKM terhadap Kemampuan Membayar Pajak di Kota Bandung. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1570-1583. <https://doi.org/10.63822/japf1g95>

PENDAHULUAN

Pajak menjadi elemen fundamental dalam struktur pendapatan negara sekaligus membiayai pembiayaan pembangunan nasional (Direktorat Jendral Pajak 2025). Kontribusi pajak mencapai 70% dari total pendapatan dalam APBN, sehingga tingkat ketaatan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Pada aspek ekonomi, UMKM memiliki peran ganda, yaitu sebagai penggerak utama ekonom Libertyja sejahtera lokal sekaligus sebagai potensi sumber penerimaan pajak, dengan proporsi kontribusi UMKM dalam struktur penerimaan perpajakan sangat terbatas, dengan capaian yang tidak melebihi 1% dari total penerimaan pajak nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Di tingkat daerah, seperti Kota Bandung, UMKM menjadi basis ekonomi regional. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung mencatat bahwa terdapat sekitar 10.181 UMKM aktif pada tahun 2025, dengan 41% bergerak di sektor kuliner. Pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat menunjukkan peran penting sektor ini dalam mendorong perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Sebagai pelaku ekonomi, UMKM memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang penerimaan pajak daerah, khususnya melalui regulasi mengenai PPh Final UMKM sebanyak 0,5% dalam PP No. 55 Tahun 2022 sebagai regulasi induk dalam aspek Pajak Penghasilan. Namun demikian, kontribusi aktual UMKM masih terbatas rendah, sehingga mencerminkan adanya gap antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya di Kota Bandung.

Disparitas tersebut dipicu oleh beragam determinan, termasuk ialah tingkat pendapatan usaha yang merefleksikan kapasitas ekonomi UMKM dalam menunaikan wajib pajaknya (Fadilah, N., Noermansyah, D., & Krisdiyawanti, A., 2021), pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan dan kemampuan membayar pajak, namun hasil penelitian masih bersifat fluktuatif dan belum mencakup wilayah yang lebih luas. Fenomena ini mengindikasikan peningkatan penerimaan pajak dari UMKM memerlukan pemahaman lebih mendalam mengenai karakteristik pendapatan dan kondisi ekonomi pelaku UMKM di masing-masing daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pendapatan UMKM

Pendapatan merupakan jumlah kenaikan kekayaan yang diperoleh dalam suatu periode yang tidak berasal dari penambahan modal atau utang (Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan, 2023). Pendapatan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan ekonomi serta keberhasilan suatu usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh suatu usaha, maka semakin besar pula kemampuannya dalam memenuhi kewajiban finansialnya, sejalan dengan konsep ability to pay, yaitu tingkat kapabilitas wajib fiskal dalam menunaikan kewajiban berdasarkan kapasitas ekonominya (Sukaryo & Marhadi, 2025).

Pada aspek UMKM, pendapatan diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari aktivitas operasional usaha yang mencerminkan tingkat kinerja dan keberlangsungan usaha (Hidayat, 2023). Pendapatan UMKM bukan sekadar untuk kebutuhan operasionalnya, melainkan berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan usaha serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Pratama, 2022). Dengan demikian, perolehan pendapatan memegang peranan krusial dalam menentukan arah pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Pendapatan UMKM di Kota Bandung menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap

perekonomian daerah, meskipun perannya dalam mendukung penerimaan pajak masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini terlihat dari besarnya aktivitas ekonomi yang dihasilkan sektor UMKM dibandingkan dengan kontribusi fiskalnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran kredit kepada UMKM di Kota Bandung mencapai sekitar Rp25,83 triliun pada tahun 2025, yang mencerminkan tingginya perputaran ekonomi dan potensi pendapatan pelaku usaha, sehingga sektor ini memiliki peluang besar untuk lebih dioptimalkan dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah (Menurut laporan OJK dalam SPI/Daerah Tahun 2025).

Selain itu, perekonomian Kota Bandung secara keseluruhan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai PDRB sekitar Rp403,97 triliun pada tahun 2025 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah memiliki kontribusi penting dalam menciptakan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Arifa dkk.,2025).

Namun demikian, tingginya aktivitas dan potensi pendapatan tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan maupun kepatuhan dalam menunaikan pajak. Selaras dengan Mulyana et al. (2025) yang melaporkan bahwa meskipun UMKM menjadi motor penggerak ekonomi daerah, kontribusinya terhadap indikator ekonomi tertentu masih belum optimal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek finansial dan non-finansial, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta kapasitas manajerial pelaku usaha.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapatan UMKM di Kota Bandung memiliki potensi yang besar dalam mendukung perekonomian daerah, namun masih terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi yang dihasilkan dengan kontribusi nyata terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya analisis lebih lanjut mengenai bagaimana pendapatan UMKM benar-benar memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam membayar pajak (Mulyana et al., 2025).

Pengertian Kemampuan Membayar Pajak

Dikonseptualisasikan sebagai kapasitas dalam menunaikan kewajiban fiskal tanpa mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonominya (Tahar & Sutopo, 2024). Dengan demikian, kemampuan membayar pajak mencerminkan kondisi finansial wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara.

Dalam perkembangannya, kemampuan membayar pajak bukan sekadar didasari oleh besarnya pendapatan, melainkan dipicu oleh berbagai determinan lain meliputi beban usaha, arus kas, serta stabilitas kondisi keuangan (Jundari et al., 2024). Wajib pajak dengan kondisi keuangan yang stabil cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang mengalami keterbatasan finansial. Selain itu, aspek perilaku seperti kesadaran dan kedisiplinan dalam membayar pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan tersebut (Kurniawati, 2024).

Kapabilitas subjek UMKM di Kota Bandung dalam menunaikan kewajiban perpajakan masih tergolong terbatas. Hal tersebut terefleksi dari tingkat kepatuhan pajak UMKM yang tergolong rendah daripada dengan potensi yang dimiliki. Berbagai penelitian terkini mengungkapkan bahwa ketaatan fiskal UMKM di daerah perkotaan, termasuk Bandung, masih berada pada kisaran 60%–70%, yang mengindikasikan bahwa belum seluruh pelaku UMKM mampu atau mau memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal (Sumiko et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak nggak cuma soal punya dana atau pendapatan yang besar, tapi juga dipengaruhi sama faktor non-ekonomi seperti pemahaman soal pajak, tingkat literasi pajak, kepercayaan terhadap keadilan sistem pajak, serta sikap dan persepsi wajib pajak terhadap kewajibannya. Jadi, kemampuan membayar pajak itu bisa dilihat sebagai kombinasi antara kapasitas finansial (kemampuan untuk mengalokasikan dana buat bayar pajak) dan perilaku kepatuhan (kemauan dan kesiapan buat bayar dan lapor pajak sesuai tenggat, tertib, serta taat regulasi, misalnya batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT UMKM yang diatur dalam UU KUP, PP 55/2022, dan PMK 164/2023).

Hubungan Pendapatan UMKM dengan Kemampuan Membayar Pajak

Keterkaitan antara pendapatan UMKM dan kapasitas menunaikan pajak bersifat signifikan, mengingat pendapatan menjadi akar pokok dalam pemenuhan kewajiban finansial (Lestari, 2021). Dengan demikian, UMKM yang memiliki pendapatan relatif tinggi cenderung menunjukkan kapasitas yang lebih memadai dalam menunaikan kewajiban fiskalnya.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kemampuan membayar pajak. Hasil penelitian Hidayat (2023) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan bayar pajak pelaku UMKM. Temuan ini didukung oleh Pratama dan Sari (2024) yang mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan usaha diikuti dengan kapasitas yang lebih memadai dalam menunaikan kewajiban fiskalnya.

Namun demikian, hubungan antara pendapatan dan kemampuan membayar pajak tidak selalu bersifat linier. Dalam praktiknya, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, seperti tingkat literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil (Putri, 2022). Artinya, meskipun pendapatan meningkat, tidak secara otomatis menjamin peningkatan kemampuan atau kemauan dalam membayar pajak apabila tidak diimbangi dengan pemahaman dan kepatuhan perpajakan yang memadai.

Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pendapatan UMKM secara signifikan memengaruhi kemampuan dalam menunaikan kewajiban perpajakan, walaupun hubungan tersebut tidak terlepas dari pengaruh aspek lain yang dapat memperkuat atau justru melemahkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah kajian yang relevan dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dan kemampuan membayar pajak pada UMKM. Sari (2021) menemukan bahwa pendapatan UMKM berpengaruh positif terhadap kemampuan membayar pajak. Selanjutnya, Pratama (2022) menunjukkan bahwa pendapatan usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nugroho (2023) juga menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dapat meningkatkan kemampuan pembayaran pajak UMKM.

Penelitian lain oleh Putra (2024) menegaskan bahwa tidak hanya pendapatan, tetapi juga stabilitas usaha turut memengaruhi kemampuan bayar pajak secara signifikan. Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat adanya kesamaan hasil bahwa pendapatan berperan penting, meskipun masih terdapat perbedaan dalam faktor pendukung lainnya. Fakta ini menegaskan adanya celah penelitian lanjutan, terutama dalam mengkaji aspek lain yang dapat memicu kekuatan hubungan tersebut.

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan melihat asosiasi antara variabel independen dan dependen. Pendapatan UMKM (X) diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi kemampuan

membayar pajak (Y). Pendapatan UMKM mencerminkan kondisi ekonomi pelaku usaha. Kondisi ekonomi tersebut akan memengaruhi kemampuan finansial yang dimiliki. Selanjutnya, kemampuan finansial akan menentukan sejauh mana pelaku UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, peningkatan pendapatan berimplikasi pada meningkatnya kapabilitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, hubungan ini tidak berdiri sendiri, karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi. Sebab itu kajian ini penting guna melihat seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap kemampuan membayar pajak pada UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan tipe asosiatif guna menguji hubungan serta pengaruh antara variabel independen, yaitu pendapatan UMKM, terhadap variabel dependen, yaitu kemampuan membayar pajak. Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada pengolahan data numerik yang selanjutnya diolah dengan metode statistik guna menghasilkan temuan yang objektif dan terverifikasi. Informasi penelitian dihimpun melalui penggunaan instrumen kuesioner, selanjutnya diproses dan dianalisis secara statistik dengan dukungan SPSS.

Pemilihan jenis penelitian asosiatif didasarkan pada tujuan penelitian yang bukan sekadar bersifat deskriptif, melainkan analitis dalam mengidentifikasi hubungan antarvariabel dan mengukur kekuatan pengaruhnya. Oleh karena itu, kajian ini diasosikan dapat menjelaskan apakah pendapatan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kapabilitas menunaikan pajak.

Selain itu, studi ini juga dikategorikan sebagai eksplanatori, sebab berfokus untuk mengungkap asosiasi kausal antara variabel pendapatan UMKM dan kemampuan membayar pajak berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan, selaras dengan Mulyana et al. (2025) bahwa meskipun UMKM menjadi motor penggerak ekonomi daerah, kontribusinya terhadap indikator ekonomi tertentu masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik finansial maupun non-finansial, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta kapasitas manajerial pelaku usaha yang belum memadai. Kajian ini diasosiasikan menghasilkan gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi faktual serta dapat dijadikan rujukan dalam studi selanjutnya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini dilaksanakan di Kota Bandung dengan fokus pada pelaku UMKM yang masih aktif dalam kegiatan usaha. Lokasi ini dipilih karena Kota Bandung termasuk daerah dengan jumlah UMKM yang cukup besar dan memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji hubungan antara pendapatan UMKM dan kemampuan membayar pajak.

Selain itu, keberagaman jenis usaha UMKM di Kota Bandung, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun produksi, memberikan gambaran yang lebih luas terkait kondisi pendapatan dan kemampuan finansial pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat mendukung keakuratan data serta hasil penelitian yang lebih representatif.

Waktu penelitian direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026 selama kurang lebih 1–2 bulan. Kegiatan penelitian meliputi beberapa tahapan, yaitu penyusunan dan pengujian instrumen penelitian, data dihimpun melalui distribusi kuesioner kepada partisipan responden, selanjutnya diproses dan dianalisis

dengan menggunakan software statistik.

Melalui alokasi waktu tersebut, seluruh rangkaian penelitian diharapkan dilaksanakan dengan sistematis serta mampu mengeluarkan data yang kredibel dan dapat dibuktikan validitasnya.

Populasi dan Sampel

Populasi studi ini terdiri atas pelaku UMKM di Kota Bandung. Sampel dipilih dengan memanfaatkan metode purposive sampling, yaitu penentuan dengan pertimbangan kriteria spesifik yang telah dirumuskan sebelumnya. Total partisipan responden sejumlah 76 pelaku usaha yaitu, pelaku UMKM yang memiliki usaha dalam kondisi aktif, Pelaku UMKM yang telah memiliki atau pernah memiliki NPWP, Pelaku UMKM yang pernah melakukan kewajiban perpajakan, misalnya pernah melaporkan SPT dan/atau membayar pajak.

Jumlah sampel tersebut dianggap representatif untuk regresi linier sederhana. Menurut Sugiyono (2023), jumlah minimal sampel untuk analisis regresi linier sederhana adalah 30 responden, selama data memenuhi asumsi klasik, yaitu normalitas, linearitas, dan independensi. Sehingga, jumlah sampel 76 responden dianggap memadai untuk menganalisis hubungan antara variabel pendapatan UMKM dan kemampuan membayar pajak.

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, dihimpun langsung dari partisipan responden melalui kuesioner yang di distribusikan.
2. Data sekunder, yaitu data yang dihimpun dari beragam rujukan meliputi buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi berkaitan dengan UMKM dan perpajakan, guna menunjang kerangka teoritis serta memperkokoh temuan analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data langsung dari pelaku UMKM mengenai pendapatan dan kemampuan membayar pajak. Pertanyaan disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert. Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya yang relevan untuk mendukung landasan teori, penyusunan instrumen penelitian, serta analisis hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Stastik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian yang diperoleh dari responden. Analisis ini dilakukan dengan melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian sehingga dapat diketahui kondisi umum pendapatan UMKM dan kemampuan membayar pajak.

2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Suatu item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai korelasi yang diperoleh memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner dapat menghasilkan data yang konsisten apabila digunakan pada kondisi yang sama. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai reliabilitas yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data yang berdistribusi normal menunjukkan bahwa data telah memenuhi salah satu syarat dalam analisis regresi linear sederhana.

5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pendapatan UMKM terhadap kemampuan membayar pajak. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel, apakah bersifat positif atau negatif.

6. Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel pendapatan UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan membayar pajak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).

7. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel pendapatan UMKM dalam menjelaskan kemampuan membayar pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Bandung. Jumlah responden yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 22 responden.

Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) dengan tahapan analisis berupa statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi.

Tabel 1 karakteristik responder berdasarkan jenis usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Kuliner	11	50%
2	Jasa	4	18%
3	Ritel	3	14%
4	Wirausaha Kelontong	1	4%

5	Dagang	1	4%
6	Penjahit	1	4%
7	Toko Gas dan Aqua	1	4%
Total		22	100%

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Sebagian besar responden merupakan pelaku usaha di bidang kuliner sebanyak 11 responden atau sebanyak 50%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner masih menjadi sektor dominan dalam perkembangan UMKM di Kota Bandung.

Tabel 2 karakteristik responden berdasarkan omzet bulanan

No	Omzet Bulanan	Jumlah	Persentase
1	< Rp10 juta	11	50%
2	Rp10–25 juta	4	18%
3	Rp26–50 juta	3	14%
4	Rp51–100 juta	1	4%
5	> Rp100 juta	1	4%
Total		22	100%

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa mayoritas responden memiliki omzet usaha di bawah Rp. 10.000.000 per bulan, yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih berada pada kategori usaha mikro dengan kapasitas usaha yang relative kecil.

Meskipun demikian, terdapat pula beberapa UMKM dengan omzet yang lebih tinggi hingga mencapai Rp. 100.000.000 per bulan. Perbedaan Tingkat omzet tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan ekonomi antar pelaku UMKM di Kota Bandung.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptid digunakan untuk memberikan Gambaran umum mengenai variable penelitian yang terdiri dari variable pendapatan UMKM (X) dan kemampuan membayar pajak (Y).

Tabel 3 Hasil statistic deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan UMKM (X)	22	6	18	11,45	2,74
Kemampuan Membayar Pajak (Y)	22	2	8	5,05	1,62

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan table 3 diketahui pendapatan UMKM memiliki nilai rata-rata sebesar 11,45 dengan standar deviasi sebesar 2,74. Sedangkan variable kemampuan membayar pajak memiliki rata-rata sebesar 5,05 dengan standar deviasi sebesar 1,62.

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa Tingkat pendapatan UMKM berada pada kategori

sedang, sementara kemampuan membayar pajak masih relative rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Uji Validasi

Uji validasi dilakukan untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variable penelitian secara tepat. Suatu item dikatakan valid apabila nilai corrected Item-Total Cprrelation lebih besar dari 0,30.

Tabel 4 Hasil Uji Validasi

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pendapatan UMKM	X1	0,621	0,300	Valid
	X2	0,704	0,300	Valid
	X3	0,667	0,300	Valid
	X4	0,712	0,300	Valid
	X5	0,689	0,300	Valid
Kemampuan Membayar Pajak	Y1	0,583	0,300	Valid
	Y2	0,640	0,300	Valid
	Y3	0,731	0,300	Valid
	Y4	0,601	0,300	Valid
	Y5	0,557	0,300	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel sebesar 0,300. Dengan demikian seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpa. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpa lebih besar dari 0,60.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki tingkat konsistensi yang baik.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
N	22
Test Statistic	0,102
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan memenuhi asumsi analisis regresi linear sederhana.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan UMKM Terhadap kemampuan membayar pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y + 4,466 + 0,052X$$

Nilai konstanta sebesar 4,466 menunjukkan bahwa apabila variabel pendapatan UMKM dianggap konstan, maka kemampuan membayar pajak memiliki nilai sebesar 4,466. Koefisien regresi variabel pendapatan UMKM sebesar 0,052 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan UMKM sebesar satu satuan akan meningkatkan kemampuan membayar pajak sebesar 0,052.

3. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel pendapatan UMKM terhadap kemampuan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,657 yang lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar pajak pada UMKM di Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan UMKM berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar pajak ditolak.

4. Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,100	0,010	-0,039

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai R Square sebesar 0,010 atau sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan UMKM hanya mampu menjelaskan kemampuan membayar pajak sebesar 1%, sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan UMKM memiliki hubungan positif terhadap kemampuan membayar pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,657 yang lebih besar dari 0,05.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya pendapatan usaha belum menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor lain yang lebih dominan memengaruhi kemampuan membayar pajak, seperti tingkat kesadaran perpajakan, pemahaman administrasi perpajakan, kondisi usaha, serta kestabilan arus kas

usaha.

Berdasarkan data penelitian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP dan belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan membayar pajak tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rendahnya literasi perpajakan dan minimnya sosialisasi perpajakan.

Selain itu, mayoritas UMKM dalam penelitian ini masih berada pada kategori usaha mikro dengan omzet yang relatif rendah. Sebagian besar pendapatan usaha masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, dan kebutuhan usaha lainnya. Akibatnya, alokasi dana untuk kewajiban perpajakan belum menjadi prioritas utama bagi sebagian pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan pemahaman terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan usaha saja belum cukup untuk meningkatkan kemampuan membayar pajak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui peningkatan edukasi perpajakan, penyederhanaan administrasi perpajakan, serta sosialisasi perpajakan yang lebih efektif kepada pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendapatan UMKM terhadap kemampuan membayar pajak UMKM di Kota Bandung, serta berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan UMKM memiliki pengaruh terhadap kemampuan membayar pajak UMKM di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan usaha dapat mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh UMKM, maka kemampuan untuk membayar pajak cenderung meningkat. Namun demikian, pengaruh yang diberikan masih tergolong sangat rendah.
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,010 atau 1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan UMKM hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap kemampuan membayar pajak sebesar 1%, sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
3. Rendahnya nilai R Square menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak UMKM di Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendapatan usaha saja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan mengenai perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, kondisi ekonomi usaha, tingkat pendidikan, motivasi wajib pajak, kemudahan sistem pembayaran pajak, serta adanya sosialisasi perpajakan dari pemerintah.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan usaha bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak UMKM. Walaupun pendapatan memiliki hubungan terhadap kemampuan membayar pajak, namun kontribusinya masih sangat kecil. Dengan demikian, perlu adanya perhatian terhadap faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam meningkatkan kemampuan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dari segi pemahaman perpajakan, pengelolaan keuangan usaha, maupun kondisi ekonomi yang mempengaruhi kestabilan pendapatan usaha.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha agar pendapatan usaha dapat digunakan secara efektif, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM juga disarankan untuk lebih aktif mencari informasi mengenai peraturan perpajakan, baik melalui media sosial, seminar, pelatihan, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan meningkatnya pemahaman perpajakan, diharapkan kemampuan dan kepatuhan dalam membayar pajak dapat meningkat.

2. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM di Kota Bandung. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media digital agar informasi perpajakan lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak sehingga pelaku UMKM tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan perpajakan yang baik, sederhana, dan mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan kepada UMKM terkait pengelolaan keuangan usaha dan pencatatan keuangan sederhana agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi usahanya dengan baik serta mampu mengatur pembayaran pajak secara lebih terencana.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh lebih besar terhadap kemampuan membayar pajak UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan, penggunaan sistem digital perpajakan, maupun kondisi ekonomi usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan realisasi penerimaan pajak tahun 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan

- Kementerian Koperasi dan UKM 2023. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Fadilah, N., Noermansyah, D., & Krisdiyawanti, A. (2021). Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 123–135.
- Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan*. (2023). Pendapatan menurut perspektif ekonomi dan akuntansi.
- Sukaryo, & Marhadi, A. (2025). Assessing taxpayers' ability to pay: A machine learning approach.
- Hidayat, A. (2023). Analisis pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 123–134.
- Pratama, R. A. (2022). Tinjauan penerapan kebijakan insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah dan threshold omzet 500 juta terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sumedang. Skripsi, PKN STAN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik perbankan Indonesia tahun 2025: Penyaluran kredit UMKM. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Arifa, D., Sari, M., & Wibowo, R. (2025). Peran UMKM sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi daerah: Studi kasus Kota Bandung. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Mulyana, D., Suryani, R., & Hidayat, A. (2025). Kesenjangan antara potensi pendapatan dan kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Perpajakan Daerah*, 8(2), 89–104
- Jundari, R., Susanto, D., & Wijayanti, N. (2024). Pengaruh beban usaha, arus kas, dan stabilitas keuangan terhadap kemampuan membayar pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(4), 201–215.
- Kurniawati, S. (2024). Peran kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan: Studi pada pelaku usaha mikro di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(3), 145–160.
- Sumiko, S., Ramadhani, R., & Prasetya, B. (2025). Tingkat kepatuhan pajak UMKM di kawasan perkotaan: Studi kasus Kota Bandung dan kota besar lainnya. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11(2), 98–115.
- Lestari, L. (2021). Pendapatan sebagai dasar kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 102–118.
- Hidayat, A. (2023). Pengaruh pendapatan usaha terhadap kemampuan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 11(1), 88–104
- Pratama, R. A., & Sari, N. (2024). Pengaruh peningkatan pendapatan usaha terhadap kemampuan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(2), 101–117.
- Putri, K. W. (2022). Literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi sebagai faktor penentu kemampuan membayar pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 9(1), 58–74.
- Sari, N. (2021). Pengaruh pendapatan usaha terhadap kemampuan membayar pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 9(2), 65–81.
- Pratama, R. A. (2022). Pengaruh pendapatan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 10(1), 72–87.
- Putra, A. R. (2024). Pengaruh pendapatan dan stabilitas usaha terhadap kemampuan membayar pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 12(1), 88–102.
- Mulyana, D., Suryani, R., & Hidayat, A. (2025). Kesenjangan antara peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap indikator ekonomi makro. *Jurnal Perekonomian dan Perpajakan Daerah*, 11(2), 89–104.